



Tingkat Persepsi Petani Padi terhadap Skema Kemitraan (*Contract Farming*) dengan BUMD di Kabupaten Lampung Barat

Achmad Aidil Al Athif¹, Subarjo², Tri Pujiana^{3*}, Destieka Ahyuni⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Lampung, Indonesia.

*Corresponding author: pujiana.tri@polinela.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima: 20/06/2026

Direvisi: 12/07/2026

Diterbitkan: 04/08/2026

Kata Kunci:

Persepsi Petani Padi; *Contract Farming* (Kemitraan Pertanian); BUMD Pangan; Kemitraan Agribisnis (KOA); Kabupaten Lampung Barat

Keywords:

Rice Farmer Perception; *Contract Farming* (Agricultural Partnership); Food BUMD; Agribusiness Partnership (KOA); West Lampung Regency

Abstrak

Program kemitraan atau *contract farming* tanaman padi antara petani dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di Kabupaten Lampung Barat diselenggarakan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengatasi persoalan permodalan, akses teknologi, dan kepastian pasar yang selama ini dihadapi petani padi. Keberhasilan program kemitraan sangat ditentukan oleh persepsi petani terhadap skema yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola *contract farming* tanaman padi antara petani dengan BUMD Kabupaten Lampung Barat, mengkaji tingkat persepsi petani padi terhadap skema kemitraan tersebut, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat persepsi petani. Penelitian dilaksanakan dengan metode survei berpendekatan kuantitatif deskriptif, melibatkan seluruh populasi sebanyak 28 petani padi peserta kemitraan sebagai responden (*sensus*). Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner berskala Likert tiga tingkat, kemudian dikategorikan berdasarkan nilai median dan kuartil skor persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan mengarah pada bentuk Kerja Sama Operasional Agribisnis (KOA) yang melibatkan pemerintah daerah, BUMD Pangan, PT. Pesagi Mandiri, distributor sarana produksi, dan petani. Sebanyak 60,7% petani menyatakan persepsi positif terhadap pola kemitraan, sementara 39,3% menyatakan persepsi negatif, terutama terkait mekanisme penetapan harga. Adapun faktor-faktor pembentuk persepsi petani sebagian besar berada pada kategori sangat positif (64,3%), didukung oleh pemahaman terhadap konsep kemitraan, pengalaman bertani, jaminan pemasaran, dan kualitas pendampingan teknis dari BUMD. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi mekanisme harga dan penguatan sosialisasi kepada petani mitra guna meningkatkan keberlanjutan program kemitraan.

Abstract

The partnership program or *contract farming* of rice between farmers and the Regional State-Owned Enterprise (BUMD) for food in West Lampung Regency is implemented as an effort to strengthen regional food security while addressing issues of capital, access to technology, and market certainty that have long been faced by rice farmers. The success of the partnership program is strongly determined by farmers' perceptions of the implemented scheme. This study aims to describe the pattern of rice *contract farming* between farmers and the BUMD in West Lampung Regency, examine the level of farmers' perceptions of the partnership scheme, and analyze the factors influencing the level of farmers' perceptions. This study was conducted using a survey method with a descriptive quantitative approach, involving the entire population of 28 rice farmers participating in the partnership as respondents (*census*). Data were collected through structured interviews using a three-point Likert scale questionnaire, and then categorized based on the median and quartile values of perception scores. The results show that the partnership pattern tends toward an Agribusiness Operational Cooperation (KOA) model involving the local government, BUMD for food, PT. Pesagi Mandiri, agricultural input distributors, and farmers. A total of 60.7% of farmers expressed positive perceptions of the partnership pattern, while 39.3% expressed negative perceptions,

mainly related to the price determination mechanism. The factors forming farmers' perceptions are mostly in the very positive category (64.3%), supported by understanding of the partnership concept, farming experience, market guarantees, and the quality of technical assistance from the BUMD. This study recommends the need to evaluate the pricing mechanism and strengthen outreach to partner farmers in order to improve the sustainability of the partnership program.

PENDAHULUAN

Pertanian menjadi fondasi utama perekonomian Indonesia, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan secara nasional sekaligus mengangkat taraf hidup masyarakat di pedesaan. Sebagai bangsa yang bertumpu pada sektor agraris, Indonesia merupakan negara yang mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu sumber mata pencaharian sekaligus penopang pembangunan nasional (Dina, 2024). Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tetap mencatatkan angka yang cukup besar, yakni sebesar 12,91% pada tahun 2022 (BPS, 2025b). Di antara berbagai komoditas pertanian, padi menempati posisi yang sangat strategis, baik sebagai bahan pangan pokok maupun sumber penghasilan bagi jutaan keluarga petani di seluruh penjuru Indonesia (Fawwaz et al., 2024).

Kabupaten Lampung Barat tercatat sebagai salah satu wilayah penghasil padi di Provinsi Lampung, dengan luas panen tanaman padi yang mencapai 11.638 hektar (BPS, 2025a). Hasil produksi padi di daerah ini menunjukkan pergerakan yang tidak stabil dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 51,87 ku/ha pada 2022, meningkat ke angka 52,03 ku/ha pada 2023, lalu turun lagi menjadi 52,50 ku/ha pada 2024 (BPS, 2025a). Kondisi ini mengindikasikan bahwa petani padi di Kabupaten Lampung Barat masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga konsistensi tingkat produktivitas usahatani (Barnawan & Sari, 2025).

Secara umum, petani padi di Indonesia masih bergulat dengan sejumlah persoalan struktural yang menjadi penghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, antara lain keterbatasan permodalan, sulitnya akses terhadap teknologi pertanian terkini, ketidakpastian harga komoditas, serta minimnya penetrasi ke pasar yang lebih luas. Salah satu strategi yang dinilai potensial untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah penerapan pola kemitraan atau *contract farming* (CF), yaitu mekanisme kerja sama antara petani dengan perusahaan atau lembaga mitra yang diformalkan melalui perjanjian tertulis (Nainggolan et al., 2024). Melalui skema tersebut, petani mendapatkan jaminan pasar, dukungan permodalan, kemudahan memperoleh sarana produksi, serta bimbingan teknis dalam kegiatan budidaya.

Program kemitraan di sektor pertanian telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani apabila pengelolaannya dilakukan secara optimal. (Pasaribu, 2016) mengemukakan bahwa kemitraan publik-swasta di bidang pertanian berpotensi memperkuat hubungan institusional antara petani dengan mitra usaha yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga petani dapat teratasi persoalan permodalan, kualitas hasil panen dapat ditingkatkan, dan akses terhadap pasar pun semakin terbuka. Sejalan dengan itu, (Permatasari & Rondhi, 2021) menegaskan bahwa keterlibatan petani padi dalam program kemitraan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga petani di berbagai daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Lampung Barat, pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan menginisiasi program *contract farming* tanaman padi sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan di tingkat daerah. Program tersebut mengintegrasikan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BUMD Pangan, PT. Pesagi Mandiri sebagai pelaksana teknis, distributor sarana produksi, hingga petani itu sendiri. Keberhasilan suatu program kemitraan tidak semata-mata bergantung pada kematangan rancangan teknis, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh cara pandang petani dalam menilai program tersebut serta sejauh mana kepuasan mereka terhadap layanan yang diperoleh dari pihak mitra (Trieanto et al., 2022).

Cara petani memaknai dan menilai skema kemitraan akan berdampak langsung pada tingkat partisipasi mereka, kepatuhan terhadap klausul kontrak, serta keberlangsungan program dalam jangka panjang (Falah et al., 2018). Hasil penelitian (Nainggolan et al., 2024) mengenai pandangan petani kopi terhadap kemitraan di Kabupaten Dairi mengungkapkan bahwa perbedaan persepsi di antara kelompok petani mitra dipengaruhi oleh bagaimana informasi dikomunikasikan kepada petani. Hal serupa ditemukan oleh (Brilliant Pintakami & Wahyu Budiman, 2021) yang menunjukkan bahwa petani cenderung memiliki persepsi yang sangat baik terhadap kemitraan manakala proses pengelolaan program berlangsung secara terbuka dan komunikatif.

Penelitian ini diarahkan untuk: (1) mendeskripsikan pola *contract farming* tanaman padi antara petani dengan BUMD Kabupaten Lampung Barat, dan (2) mengkaji persepsi petani padi terhadap skema kemitraan tersebut, baik dari sisi tingkat persepsi maupun faktor-faktor yang melatarbelakanginya. dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persepsi petani.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei yang berlandaskan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan mengungkap gambaran persepsi dan tingkat kepuasan petani terhadap program kemitraan tanaman padi. Metode survei dipilih karena dinilai mampu merekam kondisi nyata di lapangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui instrumen yang telah dirancang secara terstruktur. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Lampung Barat, dengan melibatkan petani padi yang aktif berpartisipasi dalam skema kemitraan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.

Populasi penelitian mencakup seluruh petani padi yang tergabung dalam program kemitraan BUMD di lokasi penelitian, berjumlah 28 orang. Mengingat jumlah populasi yang tidak terlalu besar, teknik penentuan sampel yang diterapkan adalah sensus atau total sampling, yakni seluruh anggota populasi dilibatkan sebagai responden (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan panduan kuesioner yang telah tersusun secara sistematis.

Variabel yang ditelaah dalam penelitian ini adalah persepsi petani terhadap skema kemitraan, yang dijabarkan melalui dua indikator pokok, yaitu (1) tingkat persepsi petani dan (2) faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi tersebut. Pengukuran dilakukan menggunakan Skala Likert tiga tingkat, dengan skor 1 (tidak setuju), skor 2 (ragu-ragu), dan skor 3 (setuju). Penyusunan instrumen penelitian merujuk pada penelitian (Widi et al., 2020) dan disesuaikan dengan konteks kemitraan BUMD Kabupaten Lampung Barat.

Pengolahan data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Pengelompokan kategori tingkat persepsi mengacu pada nilai skor maksimum, minimum, median (Me), kuartil pertama (K1), dan kuartil ketiga (K3), dengan rentang: (a) Sangat Positif: $K3 \leq X \leq \text{skor maks}$; (b) Positif: $Me \leq X < K3$; (c) Negatif: $K1 \leq X < Me$; dan (d) Sangat Negatif: $\text{skor min} \leq X < K1$. Pendekatan ini sesuai dengan prosedur analisis yang diterapkan oleh (Widi et al., 2020) dan (Andriani et al., 2025) dalam mengkaji kepuasan dan persepsi petani terhadap berbagai program pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kemitraan (*Contract Farming*) Tanaman Padi dengan BUMD Kabupaten Lampung Barat

Program kemitraan atau *contract farming* tanaman padi yang diselenggarakan di Kabupaten Lampung Barat merupakan wujud nyata kerja sama agribisnis yang melibatkan pemerintah daerah, BUMD, perusahaan pelaksana teknis, distributor sarana produksi pertanian, dan petani sebagai aktor utama, dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah. Skema ini sejalan dengan pola Kerja Sama Operasional Agribisnis (KOA) yang

dijabarkan oleh (Marina et al., 2022), di mana perusahaan mitra bertanggung jawab menyediakan modal kerja, memberikan bimbingan teknis, dan menjamin penyerapan hasil produksi petani. (Azzakiry et al., 2020) menambahkan bahwa pola kemitraan inti-plasma dan subkontrak merupakan bentuk yang paling relevan untuk sektor pertanian karena efektif dalam memperkuat konektivitas kelembagaan antara petani dengan mitra yang didukung pemerintah. Program ini secara keseluruhan melibatkan lima pemangku kepentingan utama.

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tampil sebagai inisiator sekaligus penyelenggara program swasembada pangan di tingkat daerah. Dalam kapasitas ini, pemerintah daerah merancang kebijakan teknis, menyusun program aksi, serta mengupayakan sinergi antar lembaga demi mendorong peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Peran pemerintah daerah juga mencakup fungsi fasilitasi dalam membangun koordinasi antara petani, BUMD Pangan, PT. Pesagi Mandiri, dan pihak distributor sarana produksi. Program kemitraan ini lahir sebagai respons nyata atas persoalan yang dihadapi petani padi di Kabupaten Lampung Barat, meliputi keterbatasan modal usaha, rendahnya penguasaan teknologi pertanian, serta lemahnya jaminan terhadap pemasaran hasil panen (Barnawan & Sari, 2025).

2. PT. Pesagi Mandiri

PT. Pesagi Mandiri menjalankan peran sebagai pihak yang bertanggung jawab secara teknis atas pelaksanaan program *contract farming* di lapangan. Perusahaan ini memberikan bimbingan intensif kepada petani terkait pemilihan benih unggul, penentuan pola tanam, rekomendasi pemupukan, strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta adopsi teknologi pertanian masa kini. Selain itu, PT. Pesagi Mandiri bertindak selaku *offtaker*, yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membeli seluruh hasil panen petani sesuai kesepakatan dalam kontrak. Adanya jaminan pembelian ini memberikan perlindungan nyata bagi petani dari risiko kerugian yang diakibatkan oleh gejolak harga pasar, sebagaimana ditegaskan oleh (Hariz Priatama et al., 2023) bahwa kemitraan memberi petani keunggulan berupa kepastian pasar, peningkatan pendapatan, dan akses terhadap teknologi yang lebih baik.

3. BUMD Pangan

BUMD Pangan berkedudukan sebagai penyedia anggaran dan sumber pembiayaan program kemitraan. Dana yang dialokasikan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional program, pembelian sarana produksi pertanian, pembiayaan kegiatan pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan budidaya petani secara bertahap sesuai kebutuhan. Peran BUMD Pangan dalam hal pembiayaan menjadi sangat vital mengingat keterbatasan modal merupakan salah satu hambatan terbesar yang dialami petani. (Trieanto et al., 2022) dalam kajiannya tentang kemitraan inti-plasma kelapa sawit menegaskan bahwa dukungan finansial dari perusahaan inti merupakan elemen kunci yang mendorong kepuasan petani dan memastikan kelangsungan program kemitraan.

4. Suplier Input Pertanian

Suplier input pertanian mengemban peran sebagai penyedia dan penyalur berbagai kebutuhan sarana produksi pertanian, yang meliputi pupuk, benih, dan pestisida yang diperlukan petani sepanjang proses budidaya padi. Ketersediaan sarana produksi yang terjamin secara waktu, mutu, dan keterjangkauan harga menjadi determinan penting dalam mendukung keberhasilan program kemitraan. Pandangan ini sejalan dengan (Mudatsir et al., 2022) yang menemukan bahwa kemudahan dalam memperoleh input produksi menjadi

motivasi utama petani dalam menjalin kemitraan dan turut membentuk persepsi yang positif terhadap program tersebut.

5. Petani

Petani berposisi sebagai pelaku utama dalam skema *contract farming* ini. Melalui program kemitraan, petani memperoleh serangkaian keuntungan, antara lain kemudahan akses permodalan, penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, dan kepastian dalam hal pemasaran gabah. Sebagai kompensasinya, petani diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam program, menggunakan benih yang direkomendasikan, menerapkan teknik budidaya berdasarkan standar yang ditetapkan, serta menyerahkan seluruh hasil panen kepada mitra sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. (Permatasari & Rondhi, 2021) menemukan bahwa faktor usia petani, jenjang pendidikan, besaran biaya produksi, dan keanggotaan dalam kelembagaan tani secara bermakna memengaruhi keputusan petani padi untuk bergabung dalam program kemitraan di Indonesia.

Tingkat Persepsi Petani Terhadap Pola Kemitraan dengan BUMD Pangan

Pola kemitraan antara petani padi dengan BUMD Pangan di Kabupaten Lampung Barat dibangun atas dasar kepentingan bersama yang saling menguntungkan, dengan prinsip saling mendukung dan saling membutuhkan antarpihak. Pandangan petani dalam menilai pola kemitraan ini sangat ditentukan oleh persepsi yang mereka miliki. Sebagaimana dikemukakan oleh (Widi et al., 2020), persepsi petani secara signifikan dipengaruhi oleh karakteristik individu petani itu sendiri. Analisis persepsi dalam kajian ini dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu tingkat persepsi petani terhadap kemitraan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi tersebut.

Penilaian tingkat persepsi petani diukur menggunakan 10 butir pernyataan dengan rentang skor total antara 10 (minimum) hingga 30 (maksimum). Nilai median ditetapkan pada angka 20, sementara kuartil pertama (K1) berada di angka 15 dan kuartil ketiga (K3) di angka 25. Berdasarkan hasil pengolahan data, rata-rata skor persepsi petani adalah 20,18, yang menempatkan rata-rata tersebut tepat pada ambang batas kategori positif. Distribusi hasil kategorisasi secara lengkap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat persepsi petani terhadap pola kemitraan dengan BUMD pangan

Kategori Persepsi	Rentang Skor	Jumlah Petani (orang)	Persentase (%)
Sangat Positif	$25 \leq x \leq 30$	0	-
Positif	$20 \leq x < 25$	17	60,7
Negatif	$15 \leq x < 20$	11	39,3
Sangat Negatif	$10 \leq x < 15$	0	-
Total		28	100,0

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa sebanyak 17 orang atau 60,7% dari total petani responden menyatakan persepsi **positif** terhadap pola kemitraan yang dijalankan bersama BUMD Pangan. Adapun 11 orang atau 39,3% petani lainnya menyatakan persepsi negatif. Tidak ada satupun petani yang berada pada kategori sangat positif maupun sangat negatif. Temuan ini menggambarkan bahwa secara garis besar, sebagian besar petani memiliki pandangan yang cukup menguntungkan terhadap skema kemitraan yang sedang berjalan.

Persepsi positif petani terutama bertumpu pada aspek kepastian pemasaran hasil panen, kemudahan mendapatkan sarana produksi, dan penyampaian isi ketentuan kontrak serta

prosedur pelaksanaan disampaikan sejak awal kerja sama kepada petani. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian (Bansilal Derle & Tabrez Hasan, 2022) yang menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap kemitraan umumnya berada pada kategori yang baik, mengingat petani merasakan manfaat konkret berupa peningkatan pendapatan, bertambahnya pengetahuan, serta perbaikan kualitas produk yang dihasilkan. (Brilliant Pintakami & Wahyu Budiman, 2021) juga mencatat bahwa persepsi petani terhadap aspek proses kemitraan mencapai angka 78% atau tergolong cukup baik, dengan persepsi terhadap aspek evaluasi kemitraan bahkan mencapai 85% atau dikategorikan sangat baik.

Di sisi lain, 39,3% petani yang menyatakan persepsi negatif pada umumnya menilai bahwa petani belum merasakan dampak positif dari keikutsertaan dalam program kemitraan dan ketentuan harga yang ditetapkan dalam mekanisme kontrak belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar aktual di tingkat lokal serta dianggap belum sepadan dengan besarnya risiko gagal panen yang harus mereka tanggung. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Nainggolan et al., 2024) yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan petani dalam kemitraan sebagian besar berakar dari kurang transparannya proses penetapan harga dan terbatasnya distribusi informasi kepada petani. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme harga yang diterapkan BUMD Pangan agar lebih pro-petani, sebagaimana yang disarankan pula oleh (Suciati & Harli, 2021) dalam kajian kemitraan petani tanaman tanaman di Kebumen.

Faktor yang Memengaruhi Tingkat Persepsi Terhadap Pola Kemitraan dengan BUMD Pangan

Faktor-faktor pembentuk persepsi petani diukur menggunakan 8 butir pernyataan dengan rentang skor antara 8 (minimum) hingga 24 (maksimum). Nilai median ditetapkan pada angka 16, kuartil pertama (K1) pada angka 12, dan kuartil ketiga (K3) pada angka 20. Rata-rata skor yang diperoleh pada variabel ini adalah 19,50, yang berada di titik perbatasan antara kategori positif dan sangat positif. Hasil kategorisasi secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor yang memengaruhi tingkat persepsi petani terhadap pola kemitraan dengan BUMD pangan

Kategori Persepsi	Rentang Skor	Jumlah Petani (orang)	Persentase (%)
Sangat Positif	$20 \leq x \leq 24$	18	64,3
Positif	$16 \leq x < 20$	9	32,1
Negatif	$12 \leq x < 16$	1	3,6
Sangat Negatif	$8 \leq x < 12$	0	-
Total		28	100,0

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebanyak 18 orang atau 64,3% petani menyatakan persepsi **sangat positif** terhadap faktor-faktor pembentuk tingkat persepsi, dan 9 orang atau 32,1% menyatakan persepsi positif. Hanya 1 orang atau 3,6% yang menyatakan persepsi negatif, dan tidak ada satupun petani yang berada pada kategori sangat negatif. Secara keseluruhan, temuan ini mencerminkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terbentuknya persepsi petani terhadap kemitraan berada dalam kondisi yang sangat mendukung.

Faktor-faktor yang paling besar pengaruhnya dalam membentuk persepsi positif petani mencakup: pemahaman yang baik terhadap konsep kemitraan, pengalaman bertani yang mendukung kemampuan menilai manfaat kemitraan, adanya jaminan pemasaran sebagai daya tarik utama, serta keaktifan BUMD dalam memberikan bimbingan teknis. Temuan ini sejalan dengan (Permatasari & Rondhi, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan

keikutsertaan dalam organisasi tani merupakan variabel penting yang memengaruhi keputusan petani padi untuk terlibat dalam program kemitraan. (Andriani et al., 2025) dalam kajiannya mengenai kepuasan petani padi terhadap kinerja penyuluh juga menemukan korelasi yang signifikan antara karakteristik petani—termasuk pengalaman usahatani dan luas lahan—dengan tingkat kepuasan terhadap layanan yang mereka terima.

Motivasi petani untuk berpartisipasi dalam program kemitraan terbukti kuat, sebagaimana tercermin dari tingginya skor pada pernyataan yang berkaitan dengan ketertarikan petani terhadap kepastian pasar dan pengalaman bertani juga ikut mempengaruhi keputusan petani untuk bergabung dalam kemitraan. Kondisi ini sesuai dengan pandangan (Pasaribu, 2016) yang menegaskan bahwa program kemitraan pertanian yang berjalan efektif seharusnya mampu membantu petani dalam mengatasi kendala permodalan, memperbaiki kualitas hasil panen, dan memperluas akses pasar. Penelitian (Fawwaz et al., 2024) mengenai kepuasan petani terhadap Program Makmur PT Pupuk Kujang juga menyimpulkan bahwa kepastian harga jual merupakan aspek prioritas yang perlu terus dibenahi untuk meningkatkan kepuasan peserta program kemitraan.

Adapun satu petani yang menyatakan persepsi negatif pada variabel ini terkait dengan kurangnya pemahaman awal mengenai mekanisme penetapan harga dalam skema kemitraan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penyelenggaraan sosialisasi yang lebih intensif dan merata dari pihak BUMD Pangan, khususnya yang menyangkut mekanisme harga, hak-hak petani dalam kontrak, serta prosedur operasional program sejak tahap awal. (Trieanto et al., 2022) merekomendasikan bahwa untuk menjaga keberlangsungan program kemitraan, pihak inti perlu mengikutsertakan petani mitra secara aktif dalam proses pengelolaan program, serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan secara konsisten dan berkesinambungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pola kemitraan tanaman padi antara petani dengan BUMD Kabupaten Lampung Barat dijalankan melalui skema *contract farming* yang mengintegrasikan pemerintah daerah, BUMD Pangan, PT. Pesagi Mandiri, distributor sarana produksi, dan petani. Skema ini mengarah pada bentuk Kerja Sama Operasional Agribisnis (KOA), di mana BUMD Pangan mengambil peran sebagai penyedia pembiayaan, PT. Pesagi Mandiri bertanggung jawab atas pendampingan teknis sekaligus berperan sebagai *offtaker*, sedangkan petani menjalankan kegiatan budidaya sesuai standar yang telah ditetapkan dalam kontrak; (2) Sebagian besar petani memberikan persepsi positif (60,7%) terhadap tingkat kemitraan yang dijalankan, yang menandakan bahwa petani memandang skema ini memberikan manfaat yang signifikan, utamanya dalam aspek kepastian pemasaran dan aksesibilitas sarana produksi. Namun, masih terdapat 39,3% petani dengan persepsi negatif, yang terutama bersumber dari ketidakpuasan terhadap mekanisme penetapan harga; (3) Faktor-faktor yang membentuk persepsi petani mayoritas berada dalam kategori sangat positif (64,3%), yang mencerminkan bahwa pengalaman bertani, pemahaman terhadap kontrak, keberadaan jaminan pasar, dan kualitas pendampingan teknis merupakan pilar utama yang membangun persepsi positif petani terhadap program kemitraan.

Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dikemukakan, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: (1) BUMD Pangan perlu mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme penetapan harga gabah agar lebih transparan serta lebih mencerminkan kondisi pasar lokal dan ekspektasi petani, sehingga proporsi petani dengan persepsi negatif dapat ditekan secara signifikan; (2) Diperlukan penyelenggaraan sosialisasi

yang lebih menyeluruh dan terstruktur kepada seluruh petani mitra, dengan penekanan pada aspek mekanisme harga, hak-hak petani dalam perjanjian kemitraan, dan tahapan pelaksanaan program sejak dini; (3) PT. Pesagi Mandiri dan BUMD Pangan dianjurkan untuk tetap bersedia menampung hasil panen petani mitra meskipun tidak sepenuhnya memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan, dengan penerapan penyesuaian harga berdasarkan kualitas gabah yang diterima, sebagai upaya menjaga kepercayaan dan loyalitas petani dalam program; (4) Diperlukan kajian lanjutan yang mengkaji secara lebih mendalam keterkaitan antara persepsi petani dengan tingkat kepuasan, pendapatan, dan kesejahteraan petani peserta kemitraan di Kabupaten Lampung Barat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Kabupaten Lampung Barat, PT. Pesagi Mandiri, serta seluruh petani responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses pengumpulan data penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan yang diberikan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penelitian, serta kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penyediaan data pendukung. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga, rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun teknis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F., Anantanyu, S., & Rusdiyana, E. (2025). Analisis Tingkat Kepuasan Petani Padi Sawah terhadap Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di Kecamatan Purwanto , Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Triton*, 16(1), 27–36.
- Azzakiry, M. M. K., Suadnya, I. W., & Miharja, D. L. (2020). *Implementasi Pola Kemitraan PT. Bisi Internasional, Tbk dengan Petani Penangkar Benih Hortikultura di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah*.
- Bansilal Derle, V., & Tabrez Hasan, S. (2022). A Study of Farmer Perception Towards Farmer Producer Organization: A Systematic Review of Literature. *Journal of Positive School Psychology*, 2022(8), 10055–10059. <http://journalppw.com>
- Barnawan, B., & Sari, Y. E. (2025). Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usahatani Padi Di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 9(1), 94–101. <https://doi.org/10.36355/jas.v9i1.1739>
- BPS. (2025a). *Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKYWFIQIBSU3MwVHpOVWR6MDkjMyMxODAw/luas-panen-produktivitas-dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung.html?year=2025>
- BPS. (2025b). *Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (miliar rupiah)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UzFSTVVXUlliME5XYzBZNUwwNVFRa3h6Y1d3M1p6MDkjMyMwMDAw/produk-domestik-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha---miliar-rupiah-.html?year=2022>
- Brilliant Pintakami, L., & Wahyu Budiman, E. (2021). Analisis Pendapatan Dan Persepsi Petani Terhadap Kemitraan Usaha Kampung Kucai Di Kabupaten Blitar. *VIABEL: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 15(2), 141–151. <https://doi.org/10.35457/viabel.v15i2.1857>
- Dina, F. (2024). *Kontribusi dan Elastisitas Subsektor dalam Sektor Pertanian di Indonesia*. 2(3), 306–312.
- Falah, H. H., Sudarko, S., & Subekti, S. (2018). Persepsi Petani Cabai Besar dan Pengelola

- Koperasi Terhadap Kemitraan Agribisnis. *Agriekonomika*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i1.2157>
- Fawwaz, A. N., Sulandjari, K., & Wijaya, I. P. E. (2024). Analisis Kepuasan Petani Terhadap Program Makmur PT Pupuk Kujang Di Kecamatan Pedes Dan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 69–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11170438>
- Hariz Priatama, F., Safiera Wahono, S., & Andayani, A. (2023). Analisis Pendapatan Usaha Tani Jeruk Limau (*Citrus Amblycarpa*) Pola Kemitraan Dan Non Mitra Di Desa Gunungkuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Analysis of Lime Farming Income (*Citrus Amblycarpa*) Partnership and Non-Partner Patterns in Gunungkuning Village, Sindang District, Majalengka Regency. *Journal of Innovation and Research in Agriculture*, 2(1), 1–9.
- Marina, I., Dinar, D., & Izzah, L. H. (2022). Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Melalui Program Kemitraan. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 1(2), 53–60. <https://doi.org/10.31949/jsa.v1i2.3950>
- Mudatsir, R., Syarif, A., & Sumarni, B. (2022). Peran Kemitraan Petani dengan PT . Sang Hyang Seri Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Kabupaten Sidrap. *Jurnal Galung Tropika*, 11(1), 69–77.
- Nainggolan, S. A. K. R. I., Suprehatin, & Muflikh, Y. N. (2024). Pola dan Persepsi Petani Kopi Terhadap Kemitraan di Kabupaten Kediri. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jai.2024.12.2.398-412>
- Pasaribu, S. M. (2016). Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 13(1), 39. <https://doi.org/10.21082/akp.v13n1.2015.39-54>
- Permatasari, A., & Rondhi, M. (2021). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Petani Padi dalam Mengikuti Kemitraan di Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.15-30>
- Suciati, D., & Harli, N. (2021). Analisis Tingkat Kepuasan Petani Tamanu Terhadap Pola Kemitraan dengan PT Sinergi Natural Nusantara di Kebumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(0.1101/2021.02.25.432866), 1–15.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Triyanto, Ismiasih, & Manumono. (2022). *Tingkat Kepuasan dan Strategi Keberlanjutan Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit di Kalimantan Barat*. 47–57.
- Widi, R. H., Karyani, T., Hapsari, H., Trimono, L., & Hartoyo, T. (2020). Persepsi Petani Padi Sawah Terhadap Pola Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Pangan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 575–587.